

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SORONG**

SORONG - 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerahNya sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong dapat menyele

saikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021.

Laporan Kinerja KPKNL Sorong ini disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan target yang diberikan kepada KPKNL Sorong dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi .

KPKNL Sorong sebagai pintu masuk dari Pulau Papua merupakan salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memberikan layanan kepada pengguna layanan di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

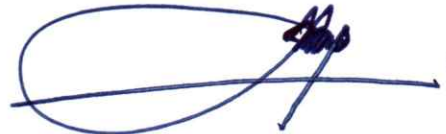
Hasil pengukuran pencapaian terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis (SS) Kemenkeu Three dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaiannya adalah sebesar **111,80%**. Target IKU yang tercapai/terlampai dengan indikator HIJAU sebanyak 18 (delapan belas) IKU, dan indikator KUNING sebanyak 1 (satu) IKU.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPKNL Sorong atas semangat dan kerjasamanya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua Maluku beserta staf yang telah memberikan pembinaan dan pengarahan, para rekan-rekan kerja instansi pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat daerah di wilayah kerja KPKNL Sorong yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku serta seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Sorong, sehingga dapat memberikan kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Sorong, 20 Januari 2022

Kepala Kantor

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Indra Eka Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis	6
C. Permasalahan.....	8
D. Upaya Pemecahan Masalah	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Penetapan Kinerja.....	13
C. Pengukuran Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
C. Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV PENUTUP	35

LAMPIRAN :

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Sorong Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tugas dan fungsi serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Sorong mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas ,penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;

7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun wilayah kerja KPKNL Sorong adalah meliputi 1 (satu) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten di propinsi Papua Barat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Sorong,
2. Kabupaten Sorong,
3. Kabupaten Sorong Selatan,
4. Kabupaten Manokwari,
5. Kabupaten Fakfak,
6. Kabupaten Teluk Wondama,
7. Kabupaten Teluk Bintuni,
8. Kabupaten Raja Ampat,
9. Kabupaten Kaimana,
10. Kabupaten Maybrat,
11. Kabupaten Tambrau,

12. Kabupaten Manokwari Selatan, dan

13. Kabupaten Pengunungan Arfak.

Sumber Daya Manusia (SDM) KPKNL Sorong yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Sorong dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	I	-	-	-
2	II	8	-	8
3	III	10	1	11
4	IV	1	-	1
Total		19	1	20

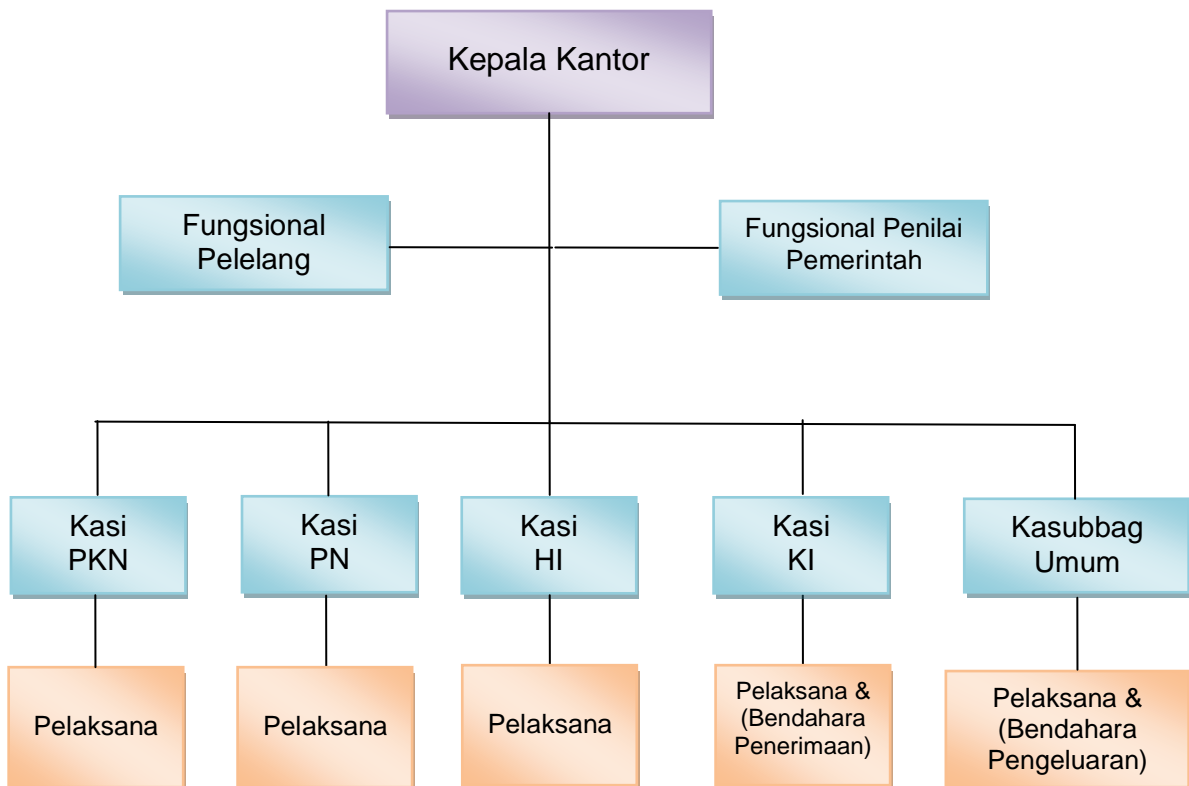
2. Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-
3	SLTA/D I/D II	-	5	-	-	5
4	D III	-	1	-	-	1
5	D IV/Sarjana	-	2	10	-	12
6	Pasca Sarjana	-	-	1	1	2
7	Doktor	-	-	-	-	-
Total		-	8	11	1	20

3. Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Total
1	Pejabat Lelang	2
2	Penilai Pemerintah	2
3	Pengadaan Barang dan Jasa	1
4	Bendahara Penerimaan	1
5	Bendahara Pengeluaran	1
6	PIC TIK	2
7	Sekretaris	0

Adapun struktur organisasi KPKNL Sorong dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL Sorong

Penjelasan struktur organisasi KPKNL Sorong :

1. Kepala Kantor, eselon IIIA;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), eselon IVA, dengan 5 (lima) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan, dan
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI), eselon IVA, dengan 2 (dua) orang pelaksana.
7. Jabatan Fungsional Pelelang 2 (satu) orang.
8. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 2 (dua) orang

Dalam kegiatan operasional, KPKNL Sorong telah menempati gedung yang baru dibangun di kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, jalan Basuki Rahmat Km.7, Sorong, dengan total luas 750m² yang terdiri dari :

1. Lantai I terdapat ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu dengan fasilitas TV dan *Free WiFi*, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Fungsional Penilai Pemerintah, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang *E-Auction*, ruang Arsip (seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Piutang Negara), ruang dapur (*Pantry*) dan kamar mandi/toilet;
2. Lantai II terdapat ruang Kepala KPKNL Sorong, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Fungsional Pelelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang

Rapat, ruang Server, ruang BKNP, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet.

Prasarana lain yang dimiliki KPKNL Sorong adalah aula/gedung pertemuan yang difungsikan untuk penyimpanan arsip, terletak di Jl. Sudirman No. 8, Sorong yang berdiri di atas tanah seluas 1.784m², (luas gedung 280m² dan halaman gedung 1.504m²).

Disamping itu, KPKNL Sorong memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

- Kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 (satu) unit.
- Kendaraan operasional sebanyak 4 (empat) unit roda empat dan 5 (lima) unit sepeda motor.
- Komputer (PC) sebanyak 19 unit, laptop 16 unit dan printer sebanyak 18 unit, server 2 unit, dan UPS sebanyak 29 unit.
- Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 7 (tujuh) unit yang berdiri diatas sebagian tanah GKN Sorong (yang dipinjam pakai melalui Kantor Pusat DJKN ke Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI) dan 1 (satu) unit berdiri di atas tanah KPKNL Sorong (Jalan Jenderal Sudirman No.8, Sorong). Rumah dinas sebanyak 1 (satu) unit ukuran 70m² untuk kepala kantor dan 7 (tujuh) unit ukuran 50m² untuk kasubbag umum dan para kepala seksi. Dengan terwujudnya pengadaan rumah dinas yang ditempati oleh para pejabat struktural KPKNL Sorong tersebut, akan meringankan terhadap biaya sewa rumah.

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Sorong mempunyai peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Sorong berperan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara itu sendiri. Peningkatan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara

tersebut terutama pada utilisasi kekayaan negara dan pengamanan kekayaan negara. Peran strategis KPKNL Sorong dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja (Satker) berupa Inventarisasi dan Penilaian BMN, Utilisasi BMN, Pemindahtanganan BMN dan Penetapan status BMN. Selain itu KPKNL Sorong juga memiliki tugas melaksanakan penilaian aset (BMN) yang berperan strategis menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau *HBU*)

2. Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan Non Performing Loan menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah Nyata yang dilaksanakan KPKNL Sorong dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Sorong berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung ;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang ;
- c. Melaksanakan penggalian piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi / pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong secara

terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Pelayanan lelang ditujukan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan.

Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk peralihan hak.

Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Sorong telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Sorong untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan virtual account (VA). Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong memperoleh bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pelayanan pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa BMN pada satker Kementerian/Lembaga.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan Internal :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah KPKNL dengan wilayah kerja yang cukup luas (1 kota dan 12 kabupaten) dengan stakeholder yang cukup banyak.

2. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari KPKNL Sorong. Hal ini karena luas dan sulitnya wilayah kerja dari KPKNL Sorong.
3. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti kendaraan operasional, PC, Laptop, dll.

Permasalahan eksternal :

1. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Sorong yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut dan udara;
2. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan.
3. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Sorong.

D. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah Internal :

1. Telah diajukan permohonan penambahan pegawai ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Sorong untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Sorong juga sering mengadakan sosialisasi internal (*knowledge sharing*) maupun sosialisasi dengan mengundang narasumber dari luar KPKNL Sorong.
2. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL untuk belanja modal dan belanja barang.

Permasalahan eksternal :

1. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan dan asistensi kepada *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Sorong.
2. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko tinggi.
3. Melaksanakan kegiatan rapat dan koordinasi dengan video conference dengan aplikasi zoom meeting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1. Visi

KPKNL Sorong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KPKNL yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Visi KPKNL Sorong mengikuti visi yang telah ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu :

“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA, PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG YANG PROFESIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Sorong dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan kedalam phrasa sebagai berikut :

- a. **Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang** adalah sebagai lembaga/institusi pemerintah yang berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.
- b. **Profesional** dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

- c. **Bertanggung jawab** dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

A.2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari visi dan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai KPKNL adalah :

1. Pengamanan dan pengembalian keuangan Negara, serta memberi kontribusi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) melalui biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan bea lelang;
2. Pelayanan lelang;
3. Pelayanan kekayaan Negara;

4. Pelayanan penilaian kekayaan Negara;
5. Pembinaan sumber daya manusia;

A.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Dalam menentukan sasaran yang akan dicapai diupayakan sasaran dimaksud se-realitis mungkin dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh KPKNL Sorong adalah :

1. Mempercepat penyelesaian kasus piutang Negara dan pencapaian target;
2. Terciptanya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan minimalisasi perkara hukum;
5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan Negara;
6. Melaksanakan penilaian kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan nilai wajar kekayaan Negara;
7. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Sorong.

A.5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang Negara
2. Peningkatan pengelolaan barang jaminan
3. Peningkatan kualitas pelayanan lelang
4. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara

5. Optimalisasi barang milik Negara
6. Penilaian kekayaan Negara
7. Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Sorong

A.6. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong diuraikan dalam program sebagai berikut :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang Negara;
2. Pengaman barang jaminan;
3. Percepatan pelayanan lelang;
4. Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN;
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
6. Pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Pelayanan di bidang keuangan;
8. Pelayanan di bidang umum;
9. Tertib administrasi barang milik Negara;
10. Pemanfaatan barang milik Negara;
11. Penilaian barang milik Negara.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Sorong harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Sorong.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Sorong selanjutnya dikembangkan ke dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama KPKNL Sorong sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1c-CP Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	89
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,4
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%

		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi Yang Efektif	6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
8.	SDM yang kompeten	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

C. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja KPKNL Sorong Tahun 2021, KPKNL Sorong berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;

5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
- Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

- Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

- Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

- Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize*

mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian IKU KPKNL Sorong tahun 2021 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja IKU Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	77,52%	125,03%
		1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	117,59%	117,59%
		1c-CP Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	100%	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	89	99,89	112,24%
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	185,49%	185,49%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,4	4,57	103,86%
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	114,73%	114,73%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%	125%	125%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%	0,44%	198%
5.	Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100%	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%	54,79%	156,54%

		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100%	108,70%	
		5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	0%	200%	
6.	Edukasi Yang Efektif	6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	89	93	104,49%	
7.	Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	93,75%	110,29%	
8.	SDM yang kompeten	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%	
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75	92,26	123,01%	
		9b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	98,13	122,66%	
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	91,48%	95,79%	

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2021 terhadap 19 (dua puluh satu) IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Sorong, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Sebanyak 18 (delapan belas) IKU status pencapaian HIJAU;.
- Sebanyak 1 (satu) IKU status pencapaian KUNING.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan KPKNL Sorong tahun 2021 adalah dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan SBSK

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							62%
Realisasi		81,65%	81,65%	80,12%	80,12%	77,52%	77,52%
Capaian							125,03%

Pencapaian Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2021 sebesar **77,52%** dari target **62%** dengan indeks capaian sebesar **125,03%**.

Target tersebut dapat tercapai karena :

- Adanya koordinasi yang baik antara KPKNL dengan satuan kerja dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menjadi target pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.

b. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal						
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							100%
Realisasi	57,07%	83,41%	83,41%	92,96%	92,96%	117.59 %	117,59%
Capaian							117,59%

Pencapaian Tingkat persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara sebesar **Rp 7.243.601.082,-** dari target **6.159.962.807,-** dengan persentase capaian sebesar **117,59%** dari target **100%**.

c. IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal						
	1c-CP Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							100%
Realisasi	19,91%	91,44%	91,44%	99,99%	99,99%	100%	100%
Capaian							100%

Pencapaian Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2021 (Saldo PNDS s.d. 2017) sebesar **Rp 147.000.000,-** dari target **Rp 147.000.000,-** dengan persentase capaian sebesar **100%** dari target **100%**.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							89
Realisasi	99,77	99,89	99,83	99,95	99,87	99,95	99,89
Capaian							112,24%

Tahun 2021 rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara yang dilakukan oleh KPKNL Sorong adalah sebesar **99,99** dari target **86**, secara capaian tercapai sebesar **112,24%**. Persentase capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar **116,18%** dan tahun 2019 sebesar **98,95%**.

Tercapainnya target indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang 2021 dikarenakan komitmen KPKNL Sorong dalam memenuhi SOP batas waktu pelayanan KPKNL Sorong sehingga setiap seksi yang terdapat di KPKNL Sorong memiliki *concern* dengan SOP tersebut.

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							100%
Realisasi	35,82%	99,20%	99,20%	114,88 %	114,88%	185,49 %	185,49%
Capaian							185,49%

Secara nominal, realisasi pokok lelang yang diperoleh KPKNL Sorong Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 155.808.825.615** yang terdiri dari Pokok Lelang Pegadaian **Rp. 137.907.749.200** dan Pokok Lelang Kelas I **Rp. 17.901.076.415**. Jika dibandingkan dengan target pokok lelang sebesar **Rp. 96.500.972.939** maka capaian realisasi pokok lelang KPKNL Sorong sebesar **185,49%**

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar **Rp. 121.145.023.025,-** maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp34.663.802.590,-** atau sebesar **28,61%%**. Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **Rp. 66.525.862.650,-** maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 89.282.962.965,-** atau sebesar **134,20%**.

Tercapainya IKU persentase hasil lelang disebabkan beberapa hal berikut :

- Melaksanakan lelang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Berkoordinasi dengan seluruh Stakeholder potensial sehingga mencapai realisasi pokok lelang secara optimal

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

K-Wide	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien						
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21

Target							4,4
Realisasi							4,57
Capaian							103,86%

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL. Pelaksanaan survei pengguna layanan ini lebih difokuskan pada penilaian *stakeholder* atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan.

Dari survei yang telah dilakukan oleh pihak internal KPKNL Sorong pada tahun 2021 diperoleh indeks sebesar **4,57** lebih tinggi dari target sebesar **4,4** atau pencapaian sebesar **103,86%**.

Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah dilakukan dan penyebaran kuesioner terhadap *stakeholder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang dilakukan KPKNL Sorong.

Berdasarkan realisasi tahun 2020 dengan indeks **4,59** maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **0,02 poin** atau sebesar **0,43%**. Berdasarkan realisasi tahun 2019 dengan indeks **4,48** maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **0,09 poin** atau sebesar **2%**.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

a. Persentase bidang tanah BMN yang Disertifikasi

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						
	4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							100%
Realisasi		93,80%	93,80%	103,88 %	103,88%	114,73 %	114,73%
Capaian							114,73%

Capaian bidang tanah BMN yang disertifikasi sebesar **148** bidang tanah dari target **129** bidang tanah, secara capaian diperoleh **114,73% dari target**. Jika diuraikan per kuartal, kuartal 2 tercapai **121** bidang tersertifikasi, hingga kuartal 3 tercapai **134** bidang tanah tersertifikasi, dan terakhir hingga akhir tahun 2021 atau kuartal 4 tercapai **148** bidang tanah tersertifikasi dari target **129** bidang tanah.

Berdasarkan realisasi tahun 2020, jumlah bidang tanah yang dapat disertipikat sebanyak **34 bidang tanah** maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak **114 bidang tanah** atau sebesar **335,29%**. Berdasarkan realisasi tahun 2019, jumlah bidang tanah yang dapat disertipikat sebanyak **51 bidang tanah** maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak **97 bidang tanah** atau sebesar **190,20%** dari tahun 2019.

Target dapat tercapai karena :

- Pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPKNL Sorong dengan Satker-satker dan Kantor Pertanahan dalam hal pensertifikatan BMN berupa tanah secara tertib;
- Adanya aplikasi SIMANTAP yang merupakan aplikasi untuk membantu mempermudah proses sertifikasi dan pengumpulan data.

b.Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							100%
Realisasi	31,25%	62,50%	62,50%	100%	100%	125%	125%
Capaian							125%

Capaian implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) sebesar **40 NUP** dari target **32 NUP**, secara capaian diperoleh **125%** dari target. Jika diuraikan per kuartal, kuartal 1 tercapai **10 NUP**, kuartal 2 tercapai **20 BMN**, hingga kuartal 3 tercapai **32**

BMN, dan terakhir hingga akhir tahun 2021 atau kuartal 4 tercapai **40 BMN** dari target **32 BMN**.

Target tersebut dapat tercapai karena :

- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPKNL dengan satuan kerja yang menjadi target implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

c. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						
	4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							22%
Realisasi	0,28%	0,12%	0,12%	1,22%	1,22%	0,44%	0,44%
Capaian							198%

Capaian Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sebesar **0,44%** dari target **22%** atau secara indeks capaian sebesar **198%**. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama dengan metode Polarisasi IKU minimize sehingga semakin kecil nilainya maka realisasinya akan tercapai.

Target tersebut dapat tercapai karena :

- Selisih nilai yang dihasilkan oleh Penilai sesuai laporan penilaian dengan persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;
- Terus berkoordinasi dengan Satker selaku Pemohon Penilaian serta Seksi PKN selaku Pengelola Barang;
- Melakukan edukasi kepada satker dalam rangka penentuan nilai taksiran.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5a-CP Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							100%
Realisasi	23,81%	90,48%	90,48%	95,24%	95,24%	100%	100%
Capaian							100%

Capaian Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN sebesar **21 BKPN** dari target **21 BKPN**, atau secara capaian diperoleh **100%** dari target. Jika diuraikan per kuartal, kuartal 1 tercapai **5 BKPN** terselesaikan, kuartal 2 tercapai **19 BKPN** terselesaikan, hingga kuartal 3 tercapai **20 BKPN** terselesaikan, dan terakhir hingga akhir tahun 2021 atau kuartal 4 tercapai **21 BKPN** terselesaikan dari target **21 BKPN** terselesaikan. Capaian BKPN yang dapat diselesaikan tahun 2021 tersebut **lebih tinggi 6 BKPN** dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebanyak **15 BKPN** dan **lebih tinggi 5 BKPN** dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar **16 BKPN**.

Tercapainya pengurusan piutang negara yang optimal pada tahun 2021 disebabkan oleh :

- Melakukan pemetaan BKPN serta meningkatkan tahapan pengurusan Piutang Negara secara optimal;
- Semakin baiknya hubungan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di bidang pengurusan piutang negara (penyerah piutang).

b. Persentase Produktivitas Lelang.

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							35%
Realisasi	57,89%	61,86%	61,86%	60,27%	60,27%	54,79%	54,79%

Capaian							156,54%
---------	--	--	--	--	--	--	---------

Capaian Produktivitas Lelang sebesar **54,79%** dari target **35%** atau secara capaian **156,54%**. Persentase produktivitas disini merupakan persentase tingkat keterlakuan sebuah lelang, capaian 54,79% artinya 54,79 lelang dari 100 lelang merupakan lelang laku. Secara frekuensi, pada tahun 2021, terdapat **119** lelang dari **217** lelang merupakan lelang laku.

Berdasarkan realisasi persentase produktivitas lelang tahun 2020 sebesar **54%** maka capaian tahun 2021 meningkat **0,79%**. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar **45,56%** maka realisasi tahun 2021 meningkat sebesar **9,23%**.

c. Persentase Pelaksanaan lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							92%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian							108,70%

E-auction merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser dan juga smartphone, dengan adanya aplikasi *e-auction*, peserta lelang dapat mengikuti lelang dari dan dimanapun berada, sangat praktis dan membantu tentunya. Sebagai salah satu layanan *quick wins* di dalam transformasi kelembagaan, tujuan dari pembangunan aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk mencapai tekad DJKN untuk menjawab modernisasi pelayanan lelang dan juga merupakan kelanjutan program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Capaian Pelaksanaan lelang E-Auction dan E-Conventional Auction sebesar **100%** dari target **92%** dan secara capaian tercapai **108,70%**. Secara frekuensi, terdapat **217** dari **217** lelang merupakan lelang E-Auction atau E-Conventional Auction. KPKNL berkomitmen bahwa lelang KPKNL Sorong diupayakan 100%

menggunakan E-Auction dan E-Conventional Auction, terbukti pada tahun 2020, seluruh lelang KPKNL Sorong sebanyak 151 frekuensi merupakan lelang E-Auction. Metode E-Auction juga diterapkan pada seluruh lelang tahun 2019 sebanyak 169 frekuensi.

d.Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							12,5%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Capaian							200%

Capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN sebesar 0% dari target 12,5% atau secara capaian 200%. Capaian 0% memiliki arti bahwa seluruh data PNBP KPKNL Sorong yang disajikan selama tahun 2021 Akurat/Tanpa Kesalahan,

6. Edukasi Yang Efektif

a. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

K-Wide	Edukasi Yang Efektif						
	6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							89
Realisasi		90,95	90,95		90,95	93	93
Capaian							104,49%

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Dari kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara,

penilaian kekayaan negara, dan pelayananan lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL pada tahun 2021. Hasilnya, capaian Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi tahun 2021 sebesar **93** dari target **89** atau secara capaian tercapai **104,49%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar 88,63 maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,37 atau sebesar 4,93%.

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar 90,00 maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,00 atau sebesar 3,33%.

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif						
	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							85%
Realisasi		93,75%	93,75%		93,75%	93,75%	93,75%
Capaian							104,49%

Capaian untuk IKU persentase tindak lanjut pengelolaan aset pada tahun 2021 adalah **93,75%** dari target **85%** dengan indeks capaian **104,49%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar **100%** maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **6,25%**. Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **80%** maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **13,75%**

8. SDM yang Kompeten

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

K-Wide	SDM yang Kompeten						
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21

Target							100%
Realisasi	22,07%	50,77%	50,77%	99,13%	99,13%	120%	120%
Capaian							120%

Persentase pengembangan kompetensi pegawai yang dapat dicapai tahun 2020 adalah sebesar **120%** dari target sebesar **100%** dengan indeks capaian **120,00%**. Seluruh pegawai KPKNL Sorong telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan Tugas/Fungsi Jabatannya masing-masing.

9. Organisasi yang *Fit for Purpose*

a. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

K-Wide	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>						
	9a-N Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							75
Realisasi							92,26
Capaian							123,01%

Nilai Hasil Review Pengelolaan kinerja sebesar 92,26 dari target 75 atau secara capaian 123,01%.

b. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

K-Wide	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>						
	9b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							80
Realisasi	95,90	98,50	97,20	98,90	97,77	99,20	98,13
Capaian							122,66%

Capaian Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 2021 sebesar **98,13** dari target **80**, secara capaian diperoleh **122,66%** dari target. Jika diuraikan per kuartal, kuartal 1 tercapai **95,90**, kuartal 2 tercapai **98,50**, hingga kuartal 3 tercapai **98,90**, kuartal 4 **99,20**, dan terakhir hingga akhir tahun 2021 tercapai indeks **98,13** dari target **80**.

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						
	10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21
Target							95,5%
Realisasi	86,30%	86,67%	86,67%	89,47%	89,47%	91,48%	91,48%
Capaian							95,79%

Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 sebesar 91,48% dari target 95,5%, secara capaian diperoleh 95,79%. Jika diuraikan per kuartal, kuartal 1 tercapai 86,30%, kuartal 2 tercapai 86,67%, kuartal 3 tercapai 89,47%, dan terakhir kuartal 4 tercapai 91,48%. Secara capaian tercapai 95,79%

Berdasarkan realisasi pada tahun 2020 sebesar **104,19%** maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **8,4%**. Jika berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **99,86%** maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **4,07%**

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja KPKNL Sorong pada tahun 2021 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 non belanja pegawai sebesar **Rp. 1.708.123.000,00**. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.635.061.362,00** atau sebesar **95,72%** dengan rincian sesuai dengan tabel berikut :

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
Belanja Barang	1.254.316.000	1.184.880.958	94.46%
Belanja Modal	453.807.000	450.180.404	99.2%
Jumlah	1.708.123.000	1.635.061.362	95.72%

2. Realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada KPKNL Sorong dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
I	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Bea Lelang;	425782
	2. Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).	425785
II	3. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	425784
	Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin;	425122
	2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan;	425129
	3. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya;	425139

PNBP pada KPKNL Sorong yang berasal dari Penerimaan Fungsional sebesar **Rp.3.395.540.336**, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Biad PPN sebesar **Rp. 4.420.544,-** (MAP 425785);

- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar **Rp. 632.964.808,-** (MAP 425782).
- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar **Rp. 2.758.154.984,-** (MAP 425784)
PNBP pada KPKNL Sorong yang berasal dari Penerimaan Umum sebesar **Rp. 12.200.000**, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 8.200.000,-** (MAP 425122);
 - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya sebesar **Rp. 4.000.000,-** (MAP 425139).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Sorong ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Sorong sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong ditetapkan berdasarkan peta strategis Kemenkeu-*Three* yang terdiri dari 12 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah disampaikan pada BAB II, rata-rata pencapaian kinerja KPKNL Sorong tahun 2020 sebesar **111,80%** yang berarti pencapaian kinerja di atas 100%. Dari 19 IKU yang ditetapkan, 18 (delapan belas) IKU berwarna hijau, dan 1 (satu) IKU berwarna kuning. Keberhasilan yang dicapai oleh KPKNL Sorong adalah bukti bahwa semakin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran KPKNL Sorong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi, dengan bekerja lebih giat lagi serta terus menerus mengamalkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan prestasi/capaian kinerja yang sudah baik, bahkan terus berusaha untuk meningkatkannya.

LAMPIRAN

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(25%)								28.33%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							113.33%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	77.52%	19%	40%	125.03%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	117.59%	14%	30%	117.59%	117.59%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	100.00%	14%	30%	100.00%	100.00%	hijau
Customer Perspective(15%)								16.53%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116.58%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	89.00	99.89	11%	44%	112.24%	112.24%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	185.49%	14%	56%	185.49%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							103.86%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.4	4.57	21%	100%	103.86%	103.86%	hijau
Internal Process Perspective (30%)								33.35%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							117.72%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	114.73%	19%	43%	114.73%	114.73%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	125.00%	11%	25%	125.00%	120.00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.44%	14%	32%	198.00%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							112.17%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	P/M	100%	100.00%	14%	25%	100.00%	100.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	54.79%	14%	25%	156.54%	120.00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92.00%	100.00%	14%	25%	108.70%	108.70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	14%	25%	200.00%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							104.49%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	93.00	14%	100%	104.49%	104.49%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							110.29%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	93.75%	14%	100%	110.29%	110.29%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)								33.58%	
8	SDM yang kompeten							120.00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120.00%	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	92.26	14%	50%	123.01%	120.00%	hijau
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	98.13	14%	50%	122.66%	120.00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							95.79%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	91.48%	14%	100%	95.79%	95.79%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111.80%	hijau